**JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES**
FISIP – Universitas Lampung
Volume : Volume 5 No 1 Tahun 2025
E-ISSN : 2829-1263
P- ISSN : 2830-0270

# Jalanan Sebagai Ruang Deliberatif Kebijakan: Menguji Demonstrasi dalam Kerangka Jürgen Habermas

Vincensius Soma Ferrer [1], Ayu Wulandari [2]

[1] *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Indonesia*
[2] *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Indonesia*

***Keywords:***

*Deliberative Democracy, Demonstration, Public Sphere, Political Communication, Public Policy*

*ABSTRACT*

*Demonstrations are frequently characterized merely as protests against government policies or expressions of public dissent. However, viewed through the lens of Jürgen Habermas' deliberative democracy, they possess profound significance. Beyond mere confrontation, demonstrations serve as an arena for public communication where citizens interact, deliberate, and shape a collective political will. This study investigates the significant wave of protests across Indonesia in late 2025, demanding transparency and accountability in public budget management – specifically concerning the salary and allowance hikes for House of Representatives (DPR) members. Employing a qualitative case study design and critical discourse analysis, this research reveals that demonstrations function as informal deliberative spaces operating outside state institutions. Through spontaneous communication, participants not only articulate political demands but also construct a shared understanding of public exigencies, particularly fiscal justice and financial accountability. This phenomenon illustrates that deliberative practices are not confined to formal forums; they can emerge organically on the streets, transforming citizens into active subjects of policy discourse. Consequently, this study validates demonstrations as a legitimate component of Indonesia's deliberative democracy and contributes to the conceptual strengthening of participatory and responsive public governance.*

Kata Kunci :

Demokrasi Deliberatif, Demonstrasi, Ruang Publik, Komunikasi Politik, Kebijakan Publik

**ABSTRAK**

Demonstrasi kerap hanya dipahami sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah atau ekspresi ketidakpuasan publik atas keputusan politik. Namun, dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, demonstrasi menyimpan makna yang lebih mendalam. Demonstrasi tidak hanya semata tindakan konfrontatif, tetapi juga mampu untuk dilihat sebagai arena komunikasi publik dimana warga negara saling berinteraksi, berargumentasi dan bersama-sama membentuk kehendak politik kolektif. Penelitian ini menelaah gelombang besar protes warga yang terjadi pada berbagai daerah di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, terutama terkait kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta analisis wacana kritis, penelitian ini menemukan bahwa demonstrasi dapat berfungsi sebagai ruang deliberatif non formal yang hidup di luar institusi negara. Melalui komunikasi spontan, peserta demonstrasi tidak hanya menyalurkan tuntutan politik ataupun kekecewaan kebijakan publik, tetapi juga membangun pemahaman bersama tentang kebutuhan publik, khususnya keadilan fiskal serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik deliberasi tidak selalu lahir dari forum resmi, tetapi dapat tumbuh secara organik di jalanan, dimana warga negara menjadi subjek aktif dalam perumusan wacana kebijakan. Penelitian ini menegaskan posisi demonstrasi sebagai bagian sah dari demokrasi deliberatif Indonesia serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan tata kelola publik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi-tuntutan masyarakat.

# I. Pendahuluan

Demonstrasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari denyut perjalanan politik suatu bangsa, secara khusus pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Ia hadir sebagai bentuk artikulasi politik warga negara, sebuah mekanisme kolektif masyarakat untuk bersuara ketika saluran formal tidak lagi memadai dalam menampung aspirasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya berdenyut di ruang-ruang institusional, tetapi juga tumbuh di ruang publik yang cair terbuka dan sarat dengan proses negosiasi. Dalam konteks global, demonstrasi telah lama menjadi instrumen ekspresi politik warga negara yang berperan penting dalam mengoreksi arah kebijakan negara dan menguji legitimasi kekuasaan. Hingga kini, praktik tersebut tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi modern. Gerakan *Yellow Vest* di Prancis (2018), Black Lives Matter di Amerika Serikat (2020), hingga demonstrasi menentang reformasi pensiun di Jerman (2024), menunjukan bagaimana publik menggunakan ruang politik untuk menuntut keadilan, transparansi dan kesetaraan. (Aspinall, 2013) (Charles, 2004).

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana tradisi demonstrasi memiliki akar historis yang panjang dan berlapis. Sebagai contoh, gerakan demonstrasi pada 1966 yang menggulingkan pemerintahan Orde Lama, gelombang reformasi pada 1998 yang menandai runtuhnya kekuasaan pemerintah Orde Baru, hingga aksi kontemporer yang menyoroti isu-isu strategis seperti korupsi, lingkungan hidup dan kebijakan fiskal, demonstrasi telah menjadi wajah dinamis partisipasi politik warga negara (Aspinall & Mietzner, 2014) (Aspinall & Mietzner, 2019).

Dalam perjalanan sejarah tersebut, demonstrasi tidak hanya sebagai sarana protes, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan akuntabilitas negara. Dan saat memasuki era kini, praktek demonstrasi tetap menjadi bagian yang hidup dari ekspresi politik warga negara, meskipun secara teknis tampil dengan wajah yang berbeda. Ia tak lagi dipahami sebagai letupan emosional atau perlawanan ideologis semata, melainkan sebagai kesadaran baru yang lebih rasional dan tematik. Aksi massa kini lebih kerap muncul dari kepedulian dan kesadaran rasional warga negara terhadap isu-isu substantif, seperti tata kelola dan keadilan sosial. Salah satu yang menarik perhatian dari fenomena demonstrasi adalah yang terjadi di Indonesia pada rentang akhir Agustus hingga awal September 2025. Laporan The Jakarta Post (2 September 2025) mencatat bahwa dalam rentang tersebut, setidaknya terjadi lebih dari 40 aksi demonstrasi besar di berbagai daerah yang menuntut transparansi anggaran publik dan akuntabilitas pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksi-aksi ini menyoroti lemahnya implementasi prinsip open government, terutama dalam partisipasi publik dalam mengomentari penggunaan anggaran publik untuk alokasi gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

| No | Tempat | Tanggal | Substansi | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung DPR/MPR RI, Jakarta | 25 Agustus 2025 | Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR | Demonstrasi oleh berbagai kalangan dan menjadi pemicu aksi lanjutan di berbagai daerah di Indonesia |
| 2 | Kantor DPRD Yogyakarta | 29-30 Agustus 2025 | Transparansi anggaran negara dan fasilitas DPR | Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa |
| 3 | Kantor DPRD Medan | 1-2 September 2025 | Menolak kenaikan pajak dan transparansi gaji DPR | Menekankan pada implikasi fiskal |
| 4 | Kantor DPRD Provinsi Lampung | 1 September 2025 | Akuntabilitas dan transparansi anggaran publik | Dilakukan oleh banyak kalangan dan berlangsung terkoordinasi |
| 5 | Kantor DPRD provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya | 1 September 2025 | Menolak kenaikan tunjangan DPR | Demonstrasi dilakukan oleh beragam kelompok mahasiswa |

**Source:** Daftar Gelombang Demonstrasi di Indonesia, diolah peneliti (2025).

Di antara gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah, aksi yang terjadi di Bandar Lampung memperlihatkan suatu keunikan tersendiri. Demonstrasi yang terjadi pada 1 September 2025 itu menjadi momentum penting ketika ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan, terpusat di sekitaran Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut keterbukaan akan alokasi anggaran publik.Namun yang membuat peristiwa ini berbeda bukan semata pada jumlah peserta demonstrasi, melainkan suasana yang tercipta selama aksi berlangsung. Laporan Lampost.co (1 September 2025), menggambarkan bahwa demonstrasi tersebut berjalan dengan tertib, bahkan diwarnai interaksi yang dialogis antar peserta aksi, aparat kepolisian berjaga dan pejabat pemerintah daerah yang hadir untuk mendengarkan tuntutan aksi massa. Tidak ada bentrokan fisik, tidak ada juga teriakan amarah yang berujung pada kekacauan. Sebaliknya, di tengah hiruk-pikuk orasi, justru muncul forum kecil tempat mahasiswa dan masyarakat sipil berdiskusi mengenai arah tuntutan dan respons kebijakan yang diharapkan. Semua proses ini terjadi secara spontan tanpa moderator resmi, tetapi mampu berjalan dengan atmosfer komunikasi yang timbal balik. Momen ini memperlihatkan dimensi baru dalam praktik demonstrasi di Indonesia, bahwa jalanan tidak selalu menjadi simbol perlawanan, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi arena deliberatif. Di sana, warga negara dan pemerintah berjumpa dalam nuansa yang lebih egaliter. Kritik dalam bentuk tuntutan disampaikan bukan untuk memusuhi, melainkan untuk menegakan tanggung jawab penguasa negara atas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, demonstrasi di Bandar Lampung bukan hanya penting karena skalanya yang besar, melainkan ia membuka ruang baru bagi demokrasi yang lebih partisipatoris.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang jalanan yang selama ini kerap diidentikan dengan konfrontasi justru berubah menjadi tempat musyawarah non formal, suatu bentuk demokrasi jalanan yang menekan dialog, kesetaraan dan penghormatan terhadap aspirasi publik. Dari perspektif ilmu kebijakan publik, situasi ini menggambarkan proses deliberasi. Namun dari yang biasa terjadi di ruang-ruang formal pemerintahan, kini terjadi di luar ruang tersebut. Deliberasi dalam demonstrasi hadir sebagai sebuah praktik demokrasi deliberatif yang tumbuh secara organik di tengah masyarakat.

Kerangka konseptual untuk memahami fenomena semacam ini dapat ditelusuri dari pemikiran Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang dikenal sebagai pelopor gagasan deliberative democracy atau demokrasi deliberatif. Dalam karya monumentalnya *The Theory of Communicative Action* (1984) dan *Between Facts and Norms* (1996), Habermas menjelaskan kekuasaan politik yang sah tidak semata lahir dari hasil pemilihan umum, tetapi juga dari proses komunikasi yang rasional, inklusif dan setara. Ia menyebut ruang public (*offentliche sphere*) merupakan arena dimana warga negara dapat berpartisipasi melalui diskursus terbuka untuk membentuk opini publik yang rasional dan beralasan.

Bagi Habermas, deliberasi bukanlah perdebatan kosong yang bertujuan hanya untuk memenangkan argumen, melainkan suatu proses dialog yang diarahkan pada tujuan intersubjective understanding, yakni pemahaman bersama yang rasional dan etis di antara warga negara. Dalam kerangka ini, kekuasaan politik memperoleh legitimasi moral ketika keputusan publik dihasilkan melalui proses komunikasi yang bebas

dominasi, dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Konsep ruang publik Habermas memberi landasan penting bagi penelitian ini untuk memahami komunikasi politik tidak selalu harus terjadi di forum resmi seperti sidang DPR atau konsultasi publik pemerintah. Ruang publik dapat hadir dimana saja, seperti di media, di komunitas lokal atau bahkan di jalanan. Dalam konteks demonstrasi di Bandar Lampung, ruang jalanan bertransformasi menjadi arena deliberatif, tempat warga mempraktekkan komunikasi politik tanpa harus menunggu legitimasi formal dari institusi negara. Dengan demikian, demonstrasi dapat dibaca sebagai bentuk *civic engagement* yang merefleksikan deliberasi publik sekaligus memperkuat basis moral kebijakan publik.

Literatur kontemporer kemudian memperkuat argumentasi Habermas. John Dryzek dalam (Dryzek, 2002a) menegaskan demokrasi deliberatif menekankan pentingnya percakapan publik dalam membentuk legitimasi kebijakan. Ia berpendapat bahwa deliberasi memungkinkan individu untuk dapat "berbicara sebagai warga negara, bukan sebagai konsumen atau pengikut". Sejalan dengan itu, (Parkinson, 2012) menunjukan bagaimana aksi kolektif di ruang publik sering kali memunculkan "micro deliberasi" dimana partisipan secara spontan saling menimbang, mengoreksi dan memperdalam argumen. (Hendriks, 2016) bahkan memperluas gagasan tersebut dengan menunjukan bahwa ruang-ruang non formal seperti komunitas warga, forum daring hingga demonstrasi bisa berperan penting dalam memperluas inklusivitas demokrasi dan memperdalam partisipasi politik.

Jika dikaitkan dengan konteks kebijakan publik di Indonesia, teori-teori ini membuka cara pandang baru bahwa partisipasi warga tidak harus selalu melalui mekanisme formal seperti *public hearing* atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Ketika warga membentuk ruang deliberatifnya sendir di jalanan, hal itu merupakan bentuk kontrol sosial yang sah terhadap kebijakan publik. Demonstrasi dengan demikian tidak sekedar menjadi wadah protes, tetapi berfungsi sebagai forum warga yang menghubungkan pengalaman sosial dengan tanggung jawab politik. Dalam aksi di Bandar Lampung, misalnya, tuntutan transparansi anggaran publik tidak hanya menyuarakan kritik tetapi juga menyiratkan *policy feedback*, yakni respons balik masyarakat terhadap implementasi kebijakan fiskal di daerah yang dinilai belum akuntabel (Dahlberg, 2005). Dimana, saat merujuk pada peristiwa aksi massa tersebut, kemudian memperlihatkan bagaimana ruang artikulatif itu mampu bekerja secara efektif. Melalui politik aksi, warga mengembalikan fungsi demonstrasi sebagai sarana komunikasi politik yang rasional. Pemerintah kemudian merespons dengan mencabut kebijakan tunjangan perumahan DPR RI (CNN Indonesia, 2025). Langkah ini memperlihatkan bagaimana tekanan publik yang disalurkan melalui jalur deliberatif dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret sekaligus memulihkan legitimasi yang sempat goyah.

Dari sisi metodologi penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan memahami makna sosial dari tindakan korektif dalam konteks yang spesifik (Creswell, 2013). Data diperoleh dari studi literatur, analisis pemberitaan media serta dokumentasi lapangan yang dihimpun dari organisasi mahasiswa dan lembaga sipil di Bandar Lampung yang terlibat dalam demonstrasi 1 September 2025. Untuk menafsirkan data, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis sebagaimana dikembangkan oleh Norman (N. Fairclough, 2013) yang menekankan keterkaitan antara bahasa, kekuasaan dan praktik sosial. Analisis ini memungkinkan peneliti mengurai bagaimana simbol, orasi dan narasi yang muncul dalam demonstrasi tidak sekedar menjadi ekspresi emosi kolektif, melainkan juga membentuk struktur komunikasi yang bersifat deliberatif, yakni ruang dimana makna, argumen dan nilai-nilai keadilan dinegosiasikan secara terbuka diantara warga negara.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang saling berkaitan. Pertama, memahami demonstrasi sebagai ruang musyawarah non formal dalam kerangka deliberasi Habermas, yang menempatkan komunikasi rasional dan inklusif sebagai fondasi moral demokrasi. Kedua, menggambarkan dinamika deliberatif yang muncul dalam demonstrasi, termasuk pola partisipasi yang terbuka, proses negosiasi kepentingan antar peserta, serta terbentuknya solidaritas emosional yang menyatukan warga. Dan ketiga, menawarkan implikasi konseptual bagi pengembangan kebijakan publik, terutama dalam menjembatani aspirasi non formal masyarakat melalui praktik deliberasi yang lebih partisipatif.

Melalui ketiga tujuan tersebut, artikel ini diharapkan memperluas cakrawala akademik tentang demokrasi deliberatif di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Hal itu sebagaimana ditegaskan Habermas yang menyebutkan legitimasi politik yang baik lahir dari daya argumentasi yang diakui bersama oleh warga. Maka, ketika ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil berdiri di jalan untuk berdialog, sesungguhnya mereka sedang menjalankan esensi dari demokrasi deliberatif itu sendiri.

## *I. State of The Art:* Demokrasi Deliberatif dan Demonstrasi sebagai Praktik Komunikasi Politik Kebijakan Publik

Gagasan demokrasi deliberatif mencapai bentuk perumusan yang paling komprehensif dihadirkan oleh Jürgen Habermas, terutama melalui karyanya *The Theory of Communicative Action* (1984) dan *Between Fact and Norms* (1996). Dalam pemikirannya, Habermas menempatkan komunikasi rasional sebagai fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi modern. Pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa legitimasi politik tidak hanya bersumber dari kehendak mayoritas semata, melainkan proses komunikasi yang rasional, setara dan bebas dominasi. Dalam kerangka ini, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika warga negara memiliki ruang untuk berargumentasi secara terbuka dan bebas dominasi struktural untuk mempengaruhi kebijakan.

Dalam konstruksi teoritisnya, Habermas membedakan dua ranah utama dalam tatanan sosial, yakni system dan lifeworld. Ranah sistem mencakup struktural formal seperti birokrasi, pasar dan intervensi hukum yang diatur oleh rasionalitas instrumental. Sebaliknya, *lifeworld* merupakan ruang sosial empat nilai, solidaritas dan makna dibangun melalui komunikasi sehari-hari. Dalam konteks ini, demonstrasi dapat dibaca sebagai bentuk politik kehidupan (*lifeworld politics*), yakni ekspresi publik untuk berupaya menegosiasikan nilai, kebijakan dan arah moral bangsa di luar forum formal pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, kerangka gagasan Habermas menjadi sangat relevan karena negara ini masih menghadapi paradoks mendasar. Di satu sisi, sistem politik formal telah mengalami institusionalisasi yang cukup mapan berkat kejadian reformasi, di sisi lain ruang komunikasi publik kerap tersumbat oleh kepentingan elite, oligarki politik dan birokrasi yang tertutup. Akibatnya, kanal partisipasi warga di luar sistem formal menjadi arena penting menghidupkan kembali komunikasi rasional antara warga negara dengan pemerintah. Dengan demikian, demonstrasi bukanlah bentuk penentangan terhadap sistem, tetapi ekspresi deliberatif yang mengembalikan kebaikan publik sebagaimana pada esensinya.

Sejumlah pendekatan empiris memperkuat pandangan ini. Tilly (2004) dalam *Social Movements*, 1768-2004, menempatkan demonstrasi sebagai bagian dari reterteories of contention, yakni sebuah tradisi dimana warga negara menegosiasikan kekuasaan melalui aksi kolektif. Sementara itu, Charles Taylor dalam (Taylor, 2001) menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, aksi publik seperti demonstrasi menjadi sarana pembentukan identitas politik warga negara, tempat nilai-nilai moral dan solidaritas dirumuskan kembali. (Norris, 2002) dalam *Democratic Phoenix* menunjukan bahwa demonstrasi berperan memperluas partisipasi politik, terutama saat kanal formal tidak lagi responsif terhadap aspirasi warga. Dari Indonesia, (Heryanto & Hadiz, 2005) mencatat bahwa demonstrasi pasca reformasi menggambarkan dinamika civic engagement yang hidup, yaitu bentuk ekspresi masyarakat sipil untuk menuntut transparansi, keadilan dan akuntabilitas negara.

Konteks lokal di bandar Lampung pada September 2025 menjadi ilustrasi konkret dari bagian ruang non formal dapat berfungsi sebagai sarana deliberatif. Berdasarkan laporan Kompas (2025) dan Tirto.id (2025), demonstrasi di kota ini merupakan bagian dari gelombang nasional yang menyoroti isu transparansi fiskal dan kebijakan subsidi. Namun, karakteristik demonstrasi di Bandar Lampung memiliki keunikan pada dinamika aksinya, berlangsung tertib, diwarnai dialog terbuka antara peserta demonstrasi. Dalam momen-momen seperti itu, jalanan berubah menjadi ruang publik tempat argumen, data dan nilai dipertukarkan secara langsung. Demonstrasi pun beralih dari sekedar tekanan politik menjadi proses deliberasi sosial yang memunculkan peluang dialog horizontal antara warga dan pemerintah dalam sebuah ruang publik.

Gagasan mengenai ruang publik sebagaimana dirumuskan Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Habermas et al., 1994) membantu menjelaskan fenomena tersebut. Ruang publik merupakan arena diskursif dimana warga dapat berdiskusi secara rasional mengenai isu-isu bersama, bebas dari tekanan atau dominasi politik. Di era modern, ruang publik tidak selalu hadir dalam bentuk forum resmi, melainkan juga berwujud aksi kolektif, media alternatif atau bahkan ruang digital yang menjadi wadah ekspresi warga negara. (Dryzek, 2002b) memperluas gagasan ini dengan menekankan bahwa deliberasi kebijakan tidak hanya berlangsung di ruang-ruang formal seperti parlemen, tetapi juga ruang-ruang informal tempat opini publik terbentuk. Demonstrasi dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan sosial antara aspirasi warga negara dengan sistem kebijakan formal (Mansbridge, 2012) bahkan menyebut fenomena semacam itu sebagai deliberative system, yaitu jaringan komunikasi publik yang secara kolektif membentuk legitimasi dan arah kebijakan politik.

(Setiyawan, 2013) dari Universitas Gadjah Mada menunjukan bahwa demonstrasi di Yogyakarta yang dalam penelitiannya aksi massa mengangkat isu lingkungan hidup berhasil memunculkan public consensus yang akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah setempat. Kasus ini menunjukan bahwa aksi non formal seperti demonstrasi memiliki nilai deliberatif yang nyata, ia bukanlah gangguan terhadap sistem pemerintah, melainkan salah satu mekanisme yang menegakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam ranah keilmuan administrasi publik, fenomena ini dapat dibaca dalam kerangka partisipatif yang menjadi ciri *New Public Services* sebagaimana dikemukakan oleh (Denhardt & Denhardt, 2000). Paradigma ini menolak pandangan bahwa warga negara hanyalah pelanggan (*customers*) dari pemerintah dan menegaskan mereka adalah bagian dari negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Dalam kerangka tersebut, demonstrasi dapat dipahami sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) terhadap kebijakan publik. Ketika saluran formal tidak lagi berfungsi secara efektif, aksi kolektif menjadi sinyal korektif yang membantu pemerintah mengenai kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan warga. (Fung et al., 2003) menyebut proses ini sebagai *empowered participatory governance*, yaitu bentuk partisipasi publik yang bukan simbol politik, tetapi memiliki daya ubah terhadap keputusan.

Dengan demikian, demonstrasi seharusnya tidak dilihat sebagai anomali atau ancaman terhadap stabilitas administrasi publik. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari ekosistem kebijakan yang sehat karena menghidupkan kembali komunikasi dua arah antara warga dengan pemerintah. Aksi demonstrasi di Bandar Lampung pada September 2025 menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme informal dapat menghasilkan tekanan positif yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ketika warga turun ke jalan, mereka tidak semata melakukan protes, tetapi sedang berpartisipasi dalam proses deliberatif yang menegakan nilai-nilai demokrasi substantif.

Dari sisi akademik, penelitian ini menempati posisi strategis dalam lanskap kajian kebijakan publik di Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu masih memandang demonstrasi dalam bingkai sosiologis atau politik massa, seperti analisis tentang mobilisasi sosial (Rosana & Astuti, 2024) atau politik gerakan (Hadiz,2010), namun belum banyak mengaitkannya dengan gagasan deliberatif Habermas dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menafsirkan demonstrasi sebagai praktik deliberasi publik yang memiliki legitimasi moral dan epistemik, serta menawarkan kerangka analisis baru bahwa ruang-ruang non formal seperti jalan raya dapat berfungsi sebagai *policy feedback loop* yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan sistem kebijakan formal.

Adapun dalam kerangka ini, studi mengenai demonstrasi tidak lagi berhenti pada deskripsi tindakan kolektif, melainkan masuk ke jantung teori demokrasi itu sendiri. Demonstrasi dipahami sebagai praktik komunikasi yang memelihara moralitas publik, menentang distorsi rasionalitas sistem dan memperkuat hubungan antara warga negara melalui dialog yang terbuka, kritis dan setara. Demokrasi deliberatif dalam pengertian Habermas, tidak hanya hidup di parlemen, tetapi juga dimanapun tempat warga berbicara dan menegosiasikan masa depan bersama secara rasional dan penuh kesadaran.

## II. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berfokus pada demonstrasi yang terjadi di Bandar Lampung pada 1 September 2025. Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk memahami makna, dinamika sosial dan proses komunikasi yang muncul dalam fenomena demonstrasi sebagai praktik musyawarah non formal. Creswell & Poth (2018) menjelaskan penelitian kualitatif berupaya menafsirkan makna tindakan sosial dari perspektif partisipan dengan menempatkan konteks dan pengalaman sebagai kunci pemahaman terhadap realitas. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menelusuri bagaimana praktik demonstrasi tidak sekedar dipahami sebagai ekspresi politik, tetapi juga sebagai ruang deliberatif, tempat warga negara menegosiasikan kebijakan secara komunikatif.

Sementara desain studi kasus digunakan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam, holistik dan kontekstual. Kasus yang diangkat adalah demonstrasi di Bandar Lampung pada 1 September 2025 yang secara peristiwa dapat dipandang sebagai representatif dalam menggambarkan praktik deliberasi publik di tingkat lokal. Pendekatan studi kasus juga memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara peristiwa, aktor dan struktur sosial yang melingkupinya. Yin dalam (Yin, Robert K, 2003) menegaskan bahwa studi kasus sangat relevan digunakan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terpisahkan secara jelas serta ketika peneliti berupaya menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu proses sosial terjadi. Dalam konteks ini, demonstrasi dipahami bukan hanya peristiwa politik, melainkan juga sebagai proses sosial yang penuh simbol, wacana dan relasi kekuasaan.

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang pada tanggal 1 September 2025 menjadi salah satu titik utama aksi nasional yang menuntut transparansi anggaran publik, terkhusus terkait alokasi untuk gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lokasi utama aksi berada di sekitar Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, tempat ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, aktivis masyarakat dan kelompok sosial berkumpul. Pemilihan Bandar Lampung sebagai lokasi studi kasus didasarkan sejumlah pertimbangan, seperti: (1) aksi di Bandar Lampung berlangsung tertib dan deliberatif, di sini terjadi interaksi langsung antara massa dan perwakilan pemerintah dalam suasana dialog terbuka; (2) Keterlibatan lintas aktor yang menjadikan demonstrasi ini kaya akan makna sosial dan politik; (3) Karakter sosial politik Bandar Lampung yang dinamis menciptakan konteks yang ideal untuk menelusuri bagaimana warga menegosiasikan suara mereka di ruang publik non formal.

Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para aktor yang terlibat langsung. Observasi dilakukan selama dan sesudah demonstrasi untuk mencatat dinamika orasi, forum diskusi non formal, serta bentuk interaksi deliberatif antara peserta aksi, aparat dan pejabat pemerintah. Wawancara dilakukan dengan koordinator demonstrasi, perwakilan organisasi kemasyarakatan serta pejabat pemerintah daerah yang turut hadir dalam dialog di lokasi demonstrasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti media daring, dokumen resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan mengenai teori deliberasi Habermas, partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan partisipatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan kekayaan perspektif. Semua data yang diperoleh kemudian direkam, ditranskripsi dan coding secara tematik sesuai kategori analisis yang berkembang di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*/CDA) sebagaimana dikembangkan oleh Fairclough dalam (N. L. Fairclough, 1997). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga medium kekuasaan dan ideologi. Analisis wacana kritis memungkinkan peneliti menelusuri teks, praktik sosial dan struktur kekuasaan yang saling berinteraksi membentuk makna politik. Kemudian analisis dilakukan melalui tiga tahap: 1) deskripsi, untuk mengidentifikasi bentuk komunikasi (teks, slogan, orasi dan simbol yang terdapat dalam demonstrasi); 2) interpretasi, untuk memahami hubungan antara teks dengan konteks sosial demonstrasi; dan 3) eksplanasi, untuk menjelaskan bagaimana praktik komunikasi tersebut berkontribusi terhadap proses deliberatif dan pembentukan opini publik.

Melalui kerangka analisis ini, demonstrasi dibaca bukan sebagai ledakan emosi massa, tetapi sebagai proses produksi makna politik dan moral. Tindakan-tindakan simbolik seperti orasi, nyanyian dan forum diskusi dipahami sebagai bentuk komunikasi rasional yang berupaya menegosiasikan legitimasi kebijakan publik.

Sementara untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan kriteria validitas yang dikemukakan Lincoln dan Guba (1985) yaitu *credibility, transferability, dependability dan confirmability*. Peneliti juga memastikan aspek etika dengan menghormati privasi narasumber dengan tidak menampilkan identitas individu yang terlibat langsung dalam demonstrasi. Selain itu, interpretasi disusun secara reflektif untuk menghindari bias peneliti dalam membaca realitas sosial.

Kerangka *state of art* dan metode yang digunakan peneliti tidak hanya relevan bagi kajian demokrasi deliberatif, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi studi kebijakan publik. Dalam perspektif administrasi publik modern, partisipasi warga merupakan elemen kunci dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Namun, partisipasi sering kali dibatasi dalam bentuk formal, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum konsultasi publik yang kadang berikat dominasi elit dan ikatan prosedural resmi. Melalui pendekatan deliberatif, penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi warga dapat muncul dari ruang non formal seperti demonstrasi, yang justru lebih spontan, egaliter dan reflektif terhadap persoalan riil masyarakat. Dengan memahami dinamika deliberatif dalam demonstrasi, pembuat kebijakan dapat belajar untuk menjembatani aspirasi publik dari forum non formal ke dalam proses perumusan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

## III. Hasil dan Diskusi

### 1. Dinamika Lapangan: Wajah Deliberatif dari Demonstrasi

Demonstrasi di Bandar Lampung pada 1 September 2025 memperlihatkan dinamika sosial-politik yang lebih kompleks dari sekedar ekspresi protes jalanan. Ribuan mahasiswa, aktivis dan kelompok masyarakat sipil berkumpul di sekitar Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya tentang besaran gaji dan tunjangan DPR.

Dalam hasil observasi dan dokumentasi lapangan yang dihimpun melalui berbagai sumber media lokal, aksi tersebut tidak diwarnai dengan kekerasan fisik atau bentrokan dengan aparat. Sebaliknya, terlihat adanya upaya kolektif untuk menjaga keteraturan dan membuka ruang dialog. Perwakilan mahasiswa dan masyarakat sipil secara bergantian menyampaikan pendapat, bukan dengan nada agitasi, melainkan dengan narasi argumentatif yang menyentuh persoalan tata kelola anggaran, keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial pemerintah. Gaya komunikasi demonstran tidak didominasi oleh seruan agitasi, melainkan oleh argumentasi rasional yang menyinggung tata kelola anggaran, keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap tuntutan publik.

Fenomena menggambarkan pergeseran kultur demonstrasi dari bentuk konfrontatif menjadi praktik deliberatif. Jika sebelumnya demonstrasi sering diasosiasikan dengan kemarahan kolektif yang berujung kericuhan, maka aksi di Bandar Lampung justru menunjukan upaya membangun forum musyawarah di ruang publik terbuka. Warga yang ikut serta dalam demonstrasi tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berdiskusi dalam kelompok kecil di pinggiran jalan guna mencatat hasil pembicaraan, menyusun serangkaian pernyataan sikap atau tuntutan hingga merancang rekomendasi kebijakan yang kemudian diserahkan kepada pejabat daerah. Hal ini memperlihatkan praktik diskursif (*discursive practice*) yang sejalan dengan gagasan *communicative action* dari Habermas (1984) dalam teori communicative action, dimana komunikasi digunakan bukan untuk dominasi, tetapi untuk mencapai kesepahaman rasional bersama (*mutual understanding*).

Salah satu peserta demonstrasi, seorang mahasiswa menyebut bahwa "demonstrasi ini bukan hanya untuk memprotes kebijakan pemerintah, tapi meminta adanya keterbukaan soal bagaimana penggunaan anggaran publik digunakan". Pernyataan ini merefleksikan munculnya kesadaran warga negara dalam memahami haknya untuk berpartisipasi secara rasional dalam mengawasi kebijakan publik. Hal ini mempertegas gagasan Dryzek dalam (Dryzek, 2011), yang menyebut bahwa demokrasi deliberatif merupakan arena di mana warga negara belajar menginternalisasi tanggung jawab terhadap agenda kebijakan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

## 2. Praktik Deliberatif dalam Demonstrasi

Jika ditinjau dari lensa teori ruang publik Habermas dalam (Habermas, 1999), demonstrasi di Bandar Lampung dapat dimaknai sebagai upaya warga negara untuk merebut kembali ruang komunikasi politik yang selama ini dikooptasi oleh logika kekuasaan negara. Habermas memandang ruang publik adalah arena dimana warga negara secara bebas dan setara untuk berdiskusi tentang isu kepentingan bersama dengan terlepas dari otoritas negara atau kepentingan pasar. Dalam ruang inilah, legitimasi demokrasi memperoleh dasar moralnya, yakni kekuaran yang lahir dari nalar rakyat, bukan dari kekuasaan negara ataupun pengaruh pemodal.

Dalam kasus Bandar Lampung, ruang publik tersebut mampu muncul secara spontan di jalanan kota, menjelma menjadi forum deliberasi non formal. Jalanan berubah menjadi ruang deliberatif non formal, tempat mahasiswa, masyarakat sipil dan aparat berdialog secara terbuka. Demonstrasi tersebut menunjukan bagaimana komunikasi publik dapat mengambil bentuk alternatif yang tidak terikat oleh prosedur birokratis, namun tetap berlandaskan pada keterbukaan diskursif, transformasi preferensi dan solidaritas.

### *a. Keterbukaan diskursif*

Demonstrasi di Bandar Lampung memperlihatkan bagaimana partisipasi warga tidak dibatasi oleh status sosial, profesi ataupun afiliasi politik. Seluruh perwakilan dari peserta demonstrasi mendapat kesempatan untuk berdiri di mimbar orasi untuk menyuarakan pendapatnya. Inklusivitas ini sejalan dengan prinsip "*accessibility of the public sphere*" yang disebut Habermas dalam (Hidayat, 1991).

Dalam konteks kebijakan publik, keterbukaan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap monopoli wacana oleh politik elite.Selain itu, beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan media sosial untuk berargumen dan pandangan alternatif. Penggunaan Twitter, Instagram, dan WhatsApp Group menjadi ruang deliberatif digital yang memperkuat komunikasi horizontal antar warga. Hal ini menunjukan bagaimana ruang publik fisik dan digital saling melengkapi dalam memperluas partisipasi warga.

*b. Transformasi Preferensi*

Salah satu aspek paling penting dalam demokrasi deliberatif adalah kemampuan warga negara untuk mengubah atau menyesuaikan pandangan pribadi melalui diskusi rasional. Dalam aksi Lampung, hal ini tampak ketika kelompok mahasiswa yang awalnya fokus pada isu transparansi anggaran publik kemudian memperluas tuntutan pada isu sistemik daerah. Artinya demonstrasi berfungsi sebagai pembelajaran politik korektif, tempat warga mempraktikan argumentasi yang berbasis bukti dan etika publik, sebagaimana gagasan yang dituangkan Cohen & Fung dalam (Cohen et al., 1999). Sebagai contoh, forum diskusi kecil yang digelar oleh peserta demonstrasi berhasil menyusun rekomendasi kebijakan yang diharapkan. Dokumen ini kemudian diberikan kepada elite daerah sebagai bentuk partisipasi substantif warga. Langkah tersebut menunjukan bahwa deliberasi tidak berhenti pada wacana, tetapi bertransformasi menjadi aksi kebijakan yang konkret.

*c. Solidaritas Politik dan Emosi publik*

Habermas menekankan bahwa deliberasi tidak selalu bersifat rasional murni, melainkan seringkali melibatkan emosi moral kolektif. Dalam aksi di bandar Lampung, solidaritas antar warga terlihat melalui bentuk-bentuk kebersamaan yang sederhana, seperti membagikan air minum, saling melindungi hingga bersorak bersama menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Emosi yang hadir bukalah bersifat destruktif, melainkan emosi tentang tanggung jawab publik.

Fenomena ini memperkuat pandangan Parkinson (2012) bahwa deliberasi publik tidak hanya menjadi ruang formal seperti parlemen atau forum konsultasi pemerintah, melainkan juga dalam aksi kolektif di ruang publik. Dengan demikian, demonstrasi di Bandar Lampung dapat dipahami sebagai mikro-model demokrasi deliberatif Indonesia, sebagai ruang tempat warga belajar untuk berbeda pendapat tanpa bermusuhan dan mengkritik tanpa merusak legitimasi negara. Kemudian, dengan memadukan temuan dengan kerangka *Critical Discourse Analysis/CDA* Fairclough dengan konsep deliberasi habermas, penelitian ini menunjukan bahwa praktik demonstrasi di Bandar Lampung membentuk ruang publik tanpa dominasi negara. Bahasa yang digunakan demonstran tidak hanya menyampaikan penolakan, tetapi juga merumuskan argumen dan nilai mengenai pengelolaan keuangan publik. Wacana kriti ini kemudian menekan pemerintah dan DPR untuk merenspons serta menghadirkan penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, demonstrasi tidak sekedar aksi protes, tetapi bekerja sebagai mekanisme deliberasi publik yang memberi koreksi terhadap proses kebijakan.

### 3. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Tata Kelola

Dari hasil analisis peneliti, terdapat beberapa implikasi penting bagi studi dan praktik kebijakan publik di Indonesia, diantaranya:

a) *Relevansi Demonstrasi sebagai mekanisme partisipatif alternatif.* Aksi publik membuktikan bahwa demonstrasi dapat berfungsi sebagai kanal komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. Dalam konteks tata kelola modern, aksi ini mengisi kekosongan ketika saluran partisipasi formal seperti musrenbang atau konsultasi publik tidak berjalan efektif. Pemerintah sebaiknya melihat demonstrasi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai barometer legitimasi sosial atas kebijakan yang mereka buat.
b) *Rekomendasi Integrasi Partisipasi non formal ke proses kebijakan formal*. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan deliberatif dengan membentuk forum konsultasi pasca demonstrasi, melibatkan perwakilan masyarakat untuk membahas hasil demonstrasi. Langkah ini sejalan dengan praktik "*deliberative governance*" yang telah diharapkan di beberapa kota di Indonesia (Hendriks, 2006).
c) *Pendidikan demokrasi warga.* Aksi di lampung menunjukan potensi besar bagi pembentukan kesadaran politik deliberatif di kalangan masyarakat. Pengalaman demonstrasi bisa dijadikan pembelajaran tentang etika komunikasi politik, partisipasi inklusif dan tata kelola transparan.

Secara konseptual, temuan di lapangan memperluas kerangka teori Habermas dengan konteks lokal Indonesia. Jika Habermas menggambarkan ruang publik modern melalui diskursus rasional di media dan forum publik Eropa, maka dalam konteks Indonesia, ruang publik itu sering kali hadir di jalanan, di tengah panas aspal, di bawah spanduk dan poster, dalam orasi dan dialog. Di sinilah demokrasi deliberatif Indonesia menemukan bentuk khasnya: demokrasi yang hidup, bersuara dan berakar pada partisipasi warga. Dengan demikian, demonstrasi di Bandar Lampung bukan sekedar "suara jalanan", melainkan bagian dari ekologi demokrasi deliberatif di Indonesia. Jika diakomodasi dengan bijak, bentuk partisipasi ini dapat menjadi sumber legitimasi moral dan sosial bagi kebijakan publik, memperkuat hubungan antara negara dan warga negara serta meneguhkan kembali keyakinan bahwa demokrasi sejati hidup ketika rakyat berbicara, didengar dan dihargai.

## IV. Kesimpulan

Demonstrasi di Bandar Lampung pada 1 September 2025 tidak sekedar merupakan luapan ketidakpuasan publik, melainkan cermin dari kedewasaan politik masyarakat. Ribuan mahasiswa dan warga sipil yang turun ke jalan bukan hanya menolak tertutupnya informasi anggaran publik, tetapi juga sedang menegaskan hak mereka sebagai warga negara pada negara demokrasi untuk ikut menentukan arah kebijakan. Demonstrasi itu memperlihatkan bagaimana kesadaran publik tentang keadilan fiskal dan tanggung jawab sosial telah tumbuh menjadi kekuatan moral yang mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan akuntabel.

Jika dibawa melalui lensa teori ruang publik Jürgen Habermas (1996), fenomena ini memperlihatkan bagaimana warga merebut kembali ruang komunikasi politik yang selama ini dikuasai oleh negara dan elite birokrasi. Dalam pandangan Habermas, ruang publik adalah wilayah tempat warga dapat berdiskusi secara bebas dan rasional tentang warga dapat berdiskusi secara bebas dan rasional tentang urusan bersama tanpa intervensi kekuasaan. Dalam konteks Lampung, ruang publik itu justru lahir di jalanan yang kemudian berubah menjadi ruang deliberasi spontan. Di sana, warga bukan sekedar berteriak, tetapi juga berdialog menyampaikan alasan dan titik temu tentang apa yang dianggap adil dan pantas bagi kehidupan bersama.

Terdapat tiga bentuk partisipasi demonstran yang tumbuh bersamaan dengan demonstrasi. Pertama, partisipasi ekspresif, yakni luapan moral terhadap praktik ketertutupan dan ketidakadilan fiskal. Kedua, partisipasi komunikatif, dimana berbagai kelompok menyampaikan gagasan dan kritik melalui orasi, simbol, maupun forum kecil yang terbentuk secara spontan. Ketiga, partisipasi efektif, yaitu kesadaran yang tumbuh di antara peserta demonstrasi untuk melihat persoalan publik secara lebih luas, melampaui kepentingan kelompok. Kombinasi dari ketiganya menjadikan demonstrasi bukan hanya protes, tetapi juga protes belajar sosial dan politik yang melatih warga untuk berpikir dan bertindak deliberatif.

Meski demikian, temuan ini juga mengungkap adanya paradoks dalam demokrasi di tingkat lokal. Di satu sisi, warga menunjukan kedewasaan dengan menyelenggarakan aksi yang damai, tertib dan argumentatif. Setelah aksi berakhir, tidak ada mekanisme formal yang menindaklanjuti gagasan dan tuntutan warga. Energi deliberatif yang begitu besar akhirnya berhenti di jalanan, tidak mengalir ke dalam sistem kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih terjebak di antara dua dunia, antara demokrasi yang prosedural dan demokrasi yang dialogis.

Keterbatasan saluran partisipasi formal menjadi alasan ruang publik non formal seperti demonstrasi tetap bertahan dan bahkan semakin relevan. Forum-forum resmi seperti musyawarah perencanaan pembangunan atau konsultasi publik sering kali berlangsung kaku dan elitis, membuat warga negara merasa sekedar diundang untuk mendengarkan, bukan untuk berpendapat. Dalam situasi semacam ini, demonstrasi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap tata kelola yang tidak transparan. Aksi publik seperti ini pada dasarnya adalah tanda bahwa warga negara masih peduli, masih ingin dilibatkan dan masih percaya bahwa suara mereka berarti. Dari sisi kebijakan, pemerintah seharusnya memandang demonstrasi sebagai cermin kepercayaan, bukan ancaman. Ketika warga turun ke jalan dengan damai dan rasional, itu pertanda bahwa partisipasi politik masih hidup. Pemerintah yang terbuka perlu menjadikan aksi semacam ini sebagai bahan refleksi kebijakan atau mekanisme umpan balik publik untuk menjembatani aspirasi warga dengan proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Dengan begitu, politik partisipatif tidak hanya berhenti di jalan, tetapi masuk ke ruang-ruang kebijakan.

Fenomena di Lampung juga memperlihatkan pentingnya peran demonstran dalam menghidupkan ruang deliberatif. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penggerak massa, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Cara demonstran berdialog tanpa kekerasan menunjukan bahwa politik generasi baru bukan lagi soal perlawanan, tetapi tentang memperjuangkan nilai dengan cara yang rasional dan bermartabat. Namun, potensi ini hanya akan berkelanjutan jika didukung oleh pendidikan kewargaan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, berdiskusi dan menghargai perbedaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana konsep ruang publik Habermas dapat diterjemahkan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Ruang publik di sini tidak hanya dibangun oleh rasionalitas individu, tetapi juga oleh nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong-royong dan rasa malu sosial. Nilai-nilai ini memberi warna khas pada cara berdialog yang tidak selalu linier dan argumentatif, tetapi juga hanyat, empatik dan penuh rasa tanggung jawab sosial. Artinya demokrasi deliberatif di Indonesia tumbuh bukan dari model Barat semata, melainkan dari kebijaksanaan lokal seperti masyarakat. Secara keseluruhan, demonstrasi di Bandar Lampung membuktikan bahwa politik rakyat masih punya denyut dan bahwa demokrasi tidak hanya lahir di gedung parlemen, tetapi juga di jalanan, diantara rakyat yang berani berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Jika pemerintah mampu mendengar dengan rendah hati, dan warga terus berbicara dengan rasional dan bermoral, maka politik Indonesia bisa menemukan bentuknya yang paling sejati.

## Daftar Pustaka

Aspinall, E. (2013). A NATION IN FRAGMENTS: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, *45*, 27–54. https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *50*, 347–369. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980375

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *55*, 295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412

Tilly, C. (2004). Social movements, 1768-2004. Paradigm Publishers.

Cohen, J., Fung, A., & Kennedy, J. F. (1999). *Communication and the Other : Beyond Deliberative Democracy*. Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Https://Docs.Edtechhub.Org/Lib/XAH8M47G.

Dahlberg, L. (2005). The Habermasian Public Sphere: Taking Difference Seriously? In *Source: Theory and Society* (Vol. 34, Issue 2).

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, *60*, 549–559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117

Dryzek, J. S. (2002a). Deliberative Democracy and Beyond. In *Deliberative Democracy and Beyond*. Oxford University PressOxford. https://doi.org/10.1093/019925043x.001.0001

Dryzek, J. S. (2002b). Deliberative Democracy and Beyond. In *Deliberative Democracy and Beyond*. Oxford University PressOxford. https://doi.org/10.1093/019925043x.001.0001

Dryzek, J. S. (2011). Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. In *Foundations and Frontiers of Deliberative Governance* (Vol. 9780199562947). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562947.001.0001

Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis the critical study of language, second edition. In *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language, Second Edition*. Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781315834368

Fairclough, N. L. (1997). Critical discource analysis. In *Discourse studies. A multidisciplinary introduction, Vol. 2. Discourse as social interaction* (pp. 258–284). https://search.worldcat.org/title/465367388

Fung, Archon., Wright, E. Olin., & Abers, Rebecca. (2003). *Deepening democracy : institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.

Habermas, J. (1999). *Between facts and norms : contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Habermas, Jürgen., Burger, Thomas., & Lawrence, Frederick. (1994). *The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Hendriks, C. M. (2006). Integrated deliberation: Reconciling civil society's dual role in deliberative democracy. *Political Studies*, *54*, 486–508. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00612.x

Hendriks, C. M. (2016). Coupling citizens and elites in deliberative systems: The role of institutional design. *European Journal of Political Research*, *55*, 43–60. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12123

Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative Southeast Asian perspective. In *Critical Asian Studies* (Vol. 37, pp. 251–275). https://doi.org/10.1080/14672710500106341

Hidayat, Dedey. N. (1991). Habermas, Junger, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge,The MIT Press, 1991, pp. 301. In *an Inquiry Into a Category of Bourgeois Society* (Vol. 68).

Mansbridge, J. (2012). On the importance of getting things done. In *PS - Political Science and Politics* (Vol. 45, pp. 1–8). https://doi.org/10.1017/S104909651100165X

Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix*. Https://Www.Cambridge.Org/Us/Universitypress/Subjects/Politics-International-Relations/Comparative-Politics/Democratic-Phoenix-Reinventing-Political-Activism?Format=PB&isbn=9780521010535.

Parkinson, J. R. (2012). Democracy and public space : the physical sites of democratic performance. In *https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/42129/*.

Hadiz, V. R. (2010). Political Islam in post-authoritarian Indonesia. Routledge.

*Creswell and Poth, 2018, Qualitative Inquiry 4th*. Https://Pubhtml5.Com/Enuk/Cykh/Creswell_and_Poth%2C_2018%2C_Qualitative_Inquiry_4th/.

Rosana, E., & Astuti, Y. W. (2024). Mobilitas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Buruh PLTU. *Socio Religia*, *5*. https://doi.org/10.24042/sr.v5i1.23200

Setiyawan. (2013). Buku Manajemen Strategik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Taylor, B. P. (2001). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, and Contestations. By John S. Dryzek. Oxford: Oxford University Press, 2000. 195p. $29.95. *American Political Science Review*, *95*(4), 976–977. https://doi.org/10.1017/s000305540040016x

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Sage Publications.